

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui disparitas pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional dari tahun 2000 sampai dengan 2008. Data sekunder diperoleh dari BPS provinsi Sumatera Utara diolah dengan menggunakan Indeks Williamson untuk mengetahui disparitas kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara sedangkan untuk melihat pengaruh berbagai variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi regional data diolah menggunakan data panel (pooling data) selanjutnya dianalisis secara statistik ekonomi.

Secara statistik yaitu menggunakan analisis data secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh untuk masing-masing variabel secara Ekonometrik atau untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari model yang digunakan. Sedang secara ekonomi adalah pembahasan masing-masing variabel yang kemudian disesuaikan dengan teori ekonomi yang melandasinya Puspita(2005).

3.1. Teknis Analisis Disparitas Pendapatan

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dari kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara dilakukan dengan memanfaatkan laporan tahunan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang lengkap dan aktual. Selain itu, browsing melalui internet juga dilakukan guna mencari data-data tambahan ataupun melengkapi data-data yang masih kurang.
2. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mendalami dan menelaah berbagai literature, text books, serta catatan kuliah yang menunjang penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang sifatnya teoritis dan digunakan sebagai perbandingan dalam pembahasan.

Selama kurun waktu 2000 – 2008 pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten dan Kota tidak sama besarnya. Ada yang pertumbuhannya lebih kecil dari pertumbuhan di tingkat kota dan ada juga yang lebih besar. Pertumbuhan terbesar setiap tahunnya berpindah-pindah antar Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Sumatera Utara. Untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dalam hal ini antar Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Sumatera Utara dapat menggunakan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah menggunakan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Cara untuk menghitung koefisien variasi wiliamson (Tambunan, 2003) adalah sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}} \quad 0 < V_w < 1 \quad \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan :

Vw : Koefisien variasi Williamson ketimpangan pendapatan antar daerah atau kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan harga konstan tahun 2000-2008.

Y_i : PDRB Perkapita masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan harga kosntan tahun 2008-2008.

Y : PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara , harga Konstan tahun 2000 - 2008

F : Jumlah Penduduk pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

N : Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara.

Ini berarti bahwa pada dasarnya Indeks Williamson merupakan koefisien

persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis dimana dalam hal ini adalah wilayah kabupaten dan kota di Kota Propinsi Sumatera Utara. Rumus Indeks Williamson ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Ekstrimnya jika angka indeks = nol maka menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar Kabupaten dan Kota. Angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan antar Kabupaten dan Kota. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antar Kabupaten dan Kota

3.2. Spesifikasi Model

Untuk melihat ketepatan penggunaan model regresi dipergunakan pengujian secara kriteria ekonomi, kriteria statistik dan kriteria ekonometrika. Ketiga kriteria tersebut saling melengkapi satu dengan lainnya sehingga dapat memberikan informasi mengenai layak tidaknya model dipergunakan.

Secara kriteria ekonomi, kelayakan difokuskan pada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Jika PDRB (output) ditentukan oleh Kapital, Tenaga Kerja dan Investasi, maka hubungannya dinyatakan dalam koefisien regresi positif, artinya dengan adanya penambahan kapital, tenaga kerja dan investasi akan meningkatkan output (PDRB). Namun sesuai dengan hukum ekonomi yang berlaku, bila suatu input ditambahkan terus menerus sementara input lainnya tetap, maka pada saat tertentu akan berlaku kondisi *The Law of Diminishing Return*, yaitu tambahan input terus menerus yang semula mengakibatkan output meningkat, kemudian menjadi menurun.

Secara kriteria statistik dapat dilihat dari besaran R^2 (koefisien determinasi), dimana semakin besar nilainya (mendekati satu), mengindikasikan adanya keterkaitan signifikan antara variabel bebas (TTD dan Kapital) dengan variabel terikatnya (PDRB). Secara statistik juga harus dilakukan uji t (parsial) maupun uji F (simultan), apakah koefisien penduga berbeda dari nol secara signifikan. Dengan penyebutan lain, nilai dari *P-value* sangat kecil sehingga H_0 yang menyatakan bahwa koefisien regresi berbeda

dengan nol dapat diterima, dan H_a yang menyatakan koefisien regresi sama dengan nol ditolak. Disamping itu ada pula cara lain yang lebih sederhana (*manual*) untuk mendeteksi model persamaan regresi layak dipakai atau tidak, yaitu dengan mempergunakan *Plotting Diagram*. Apabila dalam diagram tersebut perbedaan (*gap*) antara angka aktual dengan estimasinya relatif kecil, persamaan regresi tersebut dapat dipergunakan (Tampubolon, 2003).

Gama (2007), melakukan penelitian tentang disparitas dan konvergensi PDRB per kapita di Kabupaten dan kota di Propinsi Bali. Dalam penelitian ini Gama ingin melihat pengaruh variabel Alokasi Investasi Fisik, Jumlah penduduk bekerja dan Persentase Penduduk 10 tahun ke atas yang pendidikannya minimal SLTA terhadap Indeks Williamson (Disparitas PDRB per kapita). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Alokasi Investasi Fisik, Jumlah penduduk bekerja dan Persentase Penduduk 10 tahun ke atas yang pendidikannya minimal SLTA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Williamson (Disparitas PDRB per kapita), sedangkan secara parsial hanya variabel Jumlah penduduk bekerja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Williamson (Disparitas PDRB per kapita). Sedangkan untuk melihat konvergensi, variabel yang dipergunakan terdiri atas PDRB per kapita awal, alokasi investasi, penduduk bekerja dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PDRB per kapita awal, alokasi investasi, penduduk bekerja dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konvergensi dan secara parsial hanya variabel PDRB per kapita awal dan alokasi investasi yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap konvergensi.

Dalam penelitian ini, model dibangun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gama tersebut dimana variabel penjelas dalam penelitian ini yang digunakan adalah jumlah penduduk bekerja, jumlah penduduk bekerja tamat SMA, dan besarnya PMTDB kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan variabel terikatnya adalah PDRB kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Spesifikasi model data panel yang akan digunakan untuk menentukan konvergensi adalah sebagai berikut.

Model yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Log Yt} = a + b_1 \text{ Log PK} + b_2 \text{ Log SLTA} + b_3 \text{ Log PMTDB} + \text{eit}$$

Keterangan :

Log Yt : PDRB perkapita Kabupaten/kota atas dasar harga konstan 2000-2008.

Log Pk : jumlah penduduk yang bekerja menurut kabupaten/Kota

LogSLTA : jumlah penduduk yang bekerja tamat minimal SLTA

Log PMTDB : alokasi investasi menurut Kabupaten/kota

a : *interception point*

b : koefisien regresi

ε : error

Dengan mempertimbangkan keunggulan data panel, maka dalam penelitian ini digunakan teknik regresi data panel pada regresi kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square / OLS*) untuk mengetahui variabel manakah yang diduga menjadi penyebab konvergensi PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Jenis Sumber Data Dan Definisi Operasional Variabel

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sedangkan sumber data berasal dari publikasi BPS Sumatera Utara. Selanjutnya data diolah dengan analisis Indeks Williamsons untuk mencari tingkat disparitas dan asumsi data panel untuk mencari hubungan pertumbuhan ekonomi dengan variabel bebasnya.

Dalam melakukan analisa tesis ini, penulis akan memfokuskan menggunakan 2 (dua) variable pengukuran, yaitu variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Konsep Variabel	Jenis Variabel	Indikator	Skala Data
PMTDB	Pembentukan modal tetap domestik bruto	Bebas	PMTDB	Nominal
Jumlah Penduduk Bekerja	Jumlah penduduk yang bekerja di setiap kabupaten /Kota	Bebas	Pk	Nominal
Jumlah penduduk yang bekerja tamat minimal SLTA	Jumlah penduduk yang bekerja dengan pendidikan minimal SLTA di setiap kabupaten /Kota	Bebas	SLTA	Nominal
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto di setiap kabupaten /Kota	Terikat	PDRB	Nominal

Pembentukan modal tetap domestic bruto (PMTDB) adalah investasi fisik yang sudah direalisasikan pada suatu waktu tertentu (misalnya pada tahun tertentu). Investasi fisik ini mencakup bangunan, mesin mesin, alat angkutan, dan barang modal lainnya, tidak termasuk nilai tanah. Dalam penghitungan PMTDB, modal kerja (working capital) tidak ikut dihitung dan dalam PMTDB masih terdapat nilai penyusutan.

Penduduk bekerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja.

Penduduk bekerja tamat minimal SMA adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan yang memiliki ijazah SMA.

PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah yang tercipta dari berbagai sektor ekonomi akibat proses produksi barang dan jasa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan

nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gama, dalam penelitian ini penulis menggunakan variable-variabel yang sama dengan Gama namun menggunakan objek penelitian yang berbeda yaitu 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara periode tahun 2000 hingga 2008.

3.4. Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dan pengujian hipotesis yang ada pada penelitian ini, maka perlu dilakukan analisis statistik terhadap data yang telah diperoleh. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dan analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Analisis regresi digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh tersebut antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, sifat hubungan ini juga dapat dijelaskan antara variabel yang satu sebagai penyebab sedangkan lainnya akibat dalam bentuk variabel independen dan variabel dependen, karena dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel independen maka dihitung koefisien korelasi parsial antara variabel dependen dan masing-masing variabel independen. Penelitian ini menggunakan program *views* untuk memperoleh semua nilai yang diinginkan.

3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Distribusi normal data dimana data memusat pada nilai rata-rata dan median (Santosa dan Ashari, 2005). Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian, data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Beberapa metode yang bisa

digunakan diantaranya jika menggunakan program SPSS dapat memakai metode Kolmogorov-Smimov (uji Lilliefors), Beberapa metode yan bisa digunakan diantaranya jika menggunakan program SPSS dapat memakai metode Kolmogorov-Smimov (uji Lilliefors) atau dengan melihat Skewness dan kurtosis dari keseluruhan variabel. Pada penelitian kali ini menggunakan Metode Kolmogorov-Smimov (uji Lilliefors), menurut Santoso (2004), pedoman pengambilan keputusan normal atau tidak sebuah distribusi data:

1. Nilai sig. Atau signifikansi atau probabilitas $< 0,05$, distribusi adalah tidak normal.
2. Nilai Sig. Atau signifikansi atau probabilitas $> 0,05$, distribusi adalah normal

3.4.2 Uji Outlier

Data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk ekstrim. Deteksi *outlier* dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data *outlier* yaitu dengan cara mengkonversi nilai data kedalam skor *standardized* (z-score), nilai z dalam penelitian ini adalah sebesar -3,00 dan +3,00 (Ghozali, 2007)

3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis regresi linier berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis regresi linier berganda (Gujarati, 2003)

Didalam penelitian ini dilakukan 3 uji asumsi klasik yang dianggap penting dalam penelitian yaitu tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen, tidak terjadi autokorelasi dan heterokedastisitas dan uji distribusi normal. Hal ini dimaksudkan agar persamaan regresi yang dihasilkan adalah BLUE (*Best Linear Unbiased Estimators*).

3.4.3.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Gujarati, 2003). Konsekuensi dari adanya multikolinearitas adalah: apabila ada kolinearitas sempurna diantara variabel independen, koefisien regresinya tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Jika kolinearitas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung besar. Hal ini mengakibatkan nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

Adanya multikolinearitas diantara variabel-variabel independen secara statistik tidak signifikan, sehingga kita tidak dapat mengetahui variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Indikator adanya multikolinearitas :

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas, menurut Hair, Jr., Joseph F. et al. (1998) adalah :

1. Mempunyai VIF yang tidak melebihi angka 10, karena jika melebihi maka ini berarti terjadi persoalan multikolinearitas.
2. Mempunyai angka Tolerance $\geq 0,1$

Jika terjadi Multikolinearitas maka bisa diperbaiki dengan mengeluarkan salah satu variabel independen yang mempunyai korelasi yang kuat. Istilah multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Bila variabel-variabel bebas berkorelasi secara sempurna, maka metode kuadrat terkecil tidak dapat digunakan. Adanya multikolinearitas mengakibatkan penaksir-penaksir kuadrat terkecil menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, masalah multikolinearitas harus dianggap sebagai satu kelemahan (*black mark*)

yang mengurangi keyakinan dalam uji signifikansi konvensional terhadap penaksir-penaksir kuadrat terkecil.

3.4.3.2. Uji Autokorelasi

Menurut Gujarati (2003) Uji autokorelasi ini dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Penelitian ini menggunakan data pooling (*pooling time series*) yang menggabungkan antara data *time series* dan data *cross section*, sehingga perlu dilakukan uji autokorelasi.

Akibat-akibat yang terjadi pada penaksir-penaksir apabila metode kuadrat terkecil diterapkan pada data mengandung autokorelasi yaitu variabel dari taksiran kuadrat terkecil akan bias kebawah (*biased downwards*) atau *underestimate*. Pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson* (DW Test) dimana nilai DW table (d_U dan d_L) ditentukan pada tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan atau $df = k$ (jumlah variabel independen), jumlah = n (Gujarati, 2003). Kriteria pengujian adalah :

1. Nilai $d_{hit} < d_L$ terdapat autokorelasi
2. Nilai $d_U \leq d_{hit} \leq d_L$ tidak dapat disimpulkan
3. Nilai $d_U \leq d_{hit} \leq 4 - d_U$ tidak ada autokorelasi
4. Nilai $4 - d_U \leq d_{hit} \leq 4 - d_L$ tidak dapat disimpulkan
5. Nilai $d_{hit} > 4 - d_L$ terdapat autokorelasi

3.4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) U yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastik, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varians yang sama. Tetapi ada

kasus dimana seluruh faktor gangguan tadi memiliki varians yang satu atau variansnya tidak konstan. Kondisi ini disebut heterokedastisitas (Kuncoro, 2001).

Uji heterokedastisitas dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan metode grafik, maka hanya perlu melihat adanya tidaknya pola tertentu yang terdapat pada scatterplot, dasar pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut (Santoso, 2004):

1. Jika pola tertentu seperti titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika model ternyata terjadi heterokedastisitas, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Cara-cara ini adalah dalam bentuk transformasi atas variabel-variabel dalam model regresi yang sedang ditaksir yaitu (Arief, 1993):

1. Melakukan transformasi dalam bentuk membagi model regresi asal dengan salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model ini.
2. Melakukan transformasi logaritma.

3.5. Uji Regresi

3.5.1 Analisis Regresi Sederhana (uji – t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Untuk dapat diperoleh model regresi yang terbaik, maka dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (*BLUE/Best Linear Unbiased Estimator*) dari penaksir atau prediktor. Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan *BLUE* ini, yaitu uji normalitas, uji gejala

multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala heteroskedastisitas.

Dari model regresi linier untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan uji t. Dalam uji t ini pada dasarnya untuk menguji hipotesis yang dinyatakan sebagai berikut:

1. $H_0 : \alpha_1 = 0 \rightarrow$ tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independen (X) secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen (Y).
2. $H_a : \alpha_1 \neq 0 \rightarrow$ terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independen (X) secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen (Y).
3. Level signifikan (α) = 0,05

Apabila nilai signifikansi < dari (α) = 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel-variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Apabila nilai signifikansi > dari (α) = 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel-variabel independen secara sendiri-sendiri tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.2 Analisis Regresi berganda (uji –F)

Model analisis regresi multiple ini selain untuk menguji adanya signifikansi keterkaitan variable independent dan variable dependen, juga digunakan untuk menguji signifikan indikator koefisien variabel independen terhadap variabel dependen yang diperoleh dari analisis regresi multiple.

Dari model regresi linier berganda tersebut, untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, dilakukan uji F. Dalam uji F ini dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

1. $H_0 : \alpha_1 = 0 \rightarrow$ tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel

dependen (Y).

2. $H_a : \alpha_1 \neq 0 \rightarrow$ terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y).
3. Level signifikan (α) = 0,05

Apabila nilai signifikansi $F_{hitung} > F_{tabel} \rightarrow H_0$ ditolak dan H_a diterima, artinya variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Apabila nilai signifikansi $F_{hitung} < F_{tabel} \rightarrow H_0$ diterima dan H_a ditolak, artinya variabel-variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Dari model regresi multiple tersebut dihitung koefisien korelasi multiple untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen. Untuk membuktikan tingkat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji F.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur kebaikan sesuai (*goodness of fit*) dari persamaan regresi yaitu memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel dependen, yang dijelaskan oleh variabel independen (Gujarati, 2003).

Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai $R^2 = 1$, berarti bahwa garis regresi yang terjadi menjelaskan 100% variasi dalam variabel dependen, jika $R^2 = 0$ berarti bahwa model yang terjadi tidak dapat menjelaskan sedikitpun garis regresi yang terjadi. Tingginya R^2 yang kita cari, dalam analisis empiris sering dijumpai model yang mempunyai R^2 tinggi, namun ternyata memiliki koefisien regresi yang tidak signifikan ataupun berbeda dengan harapan apriori.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Kondisi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak diantara 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai $71.680,68 \text{ km}^2$ atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia, dengan posisi geografis antara 1° - 4° LU dan 98° - 100° BT. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudera Hindia di sebelah Barat, serta Selat Malaka di sebelah Timur. Letak geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Potensi sumber daya alam Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Luas areal perkebunan adalah $1.634.772 \text{ ha}$ atau 22,73% dari luas Sumatera Utara dengan produksi sebesar $\pm 3.738.516 \text{ ton}$ untuk 23 komoditi diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Rata-rata pertambahan luas lahan perkebunan 0,72 % pertahun dan pertumbuhan produksi sebesar 2,74 % pertahun. Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai timur) sebesar 276.030 ton pertahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 %, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per Tahun dan baru dimanfaatkan 8,79 %. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah.

Sumatera Utara juga merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) mempunyai 399 objek wisata yang tersebar di seluruh daerah. Dari 120 objek wisata yang dipasarkan meliputi potensi alam, seperti Danau Toba, Wisata

Bahari terutama di Nias, Agro Wisata, Seni dan Budaya etnis yang masing-masing mempunyai nilai sendiri-sendiri. Komoditi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah dan sebagainya, juga berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), Jumlah Pulau sebanyak 419 buah (bernama 237 buah dan tidak bernama 182 buah) sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.

4.2 Pembagian Wilayah Berdasarkan Wilayah Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjalankan pembangunan berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten di Sumatera Utara maupun antara Sumatera Utara dan provinsi lainnya. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan, dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi dan sektor sosial kemasyarakatan ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi ke dalam empat wilayah pembangunan, yaitu wilayah Pantai Barat, Wilayah Dataran Tinggi, Wilayah Pantai Timur, dan Wilayah Pantai Selatan.

Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menurut Wilayah Pembangunan

Region	Potensi Daerah	Luas Wilayah (%)
I. Pantai Barat Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Sibolga	Pertanian Perikanan Pariwisata Perkebunan	36,85
II. Dataran Tinggi Tapanuli Utara Toba Samosir Simalungun Dairi Karo Pemantang Siantar	Pertanian Perkebunan Industri Pariwisata	28,34
III. Pantai Timur Deli Serdang Langkat Tebing Tinggi Medan Binjai	Perkebunan Pertambangan Industri Perdagangan Jasa	15,33
IV. Pantai Selatan Labuhan Batu Asahan Tanjung Balai	Perkebunan Industri Perdagangan	19,48

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bagaimana pembagian wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan wilayah pembangunan. Terdapat empat pembagian wilayah pembangunan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, Pantai Timur, dan Pantai Selatan.

Wilayah Pantai Barat terdiri atas Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Lima wilayah kabupaten/kota tersebut tercakup dalam satu wilayah pembangunan yaitu wilayah Pantai Barat karena wilayah-wilayah tersebut memiliki karakter potensi unggulan yang sama yaitu pertanian, perikanan,

perkebunan, dan pariwisata. Secara geografis, kelima wilayah tersebut juga saling berdekatan satu sama lain sehingga saling berhubungan erat dalam kaitannya dengan masalah pembangunan daerah masing-masing. Jika dilihat dari luas wilayahnya, Wilayah Pantai Timur merupakan wilayah yang luas wilayahnya paling besar yaitu 36,85% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara

Wilayah Dataran Tinggi juga merupakan satu wilayah pembangunan yang terdiri atas Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kota Pematang Siantar. Enam wilayah tersebut memiliki potensi unggulan yang sama dalam pembangunannya yaitu pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Keenam daerah tersebut juga secara geografis saling berdekatan.

Wilayah Pantai Timur adalah wilayah pembangunan yang terdiri atas Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai. Potensi unggulan kelima daerah tersebutpun memiliki potensi yang sama yaitu dibidang perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Jika dilihat dari perkembangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Pantai Timur merupakan wilayah pembangunan yang paling maju. Dapat dikatakan wilayah yang paling maju daibandingkan daerah pembangunan lainnya karena potensi unggulan sektor ekonomi sudah memasuki sektor unggulan sekunder. Sektor sekunder yang dimaksud adalah perdagangan dan jasa. Jika dilihat dari luas wilayahnya, Wilayah Pantai Timur merupakan wilayah yang luas wilayahnya paling kecil yaitu 15,33% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah Pantai Selatan mencakup Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjung Balai. Kawasan Pantai Selatan juga termasuk salah satu kawasan pembangunan yang cukup maju. Hal ini terlihat dari umumnya sektor lapangan usaha yang terdapat di kawasan tersebut adalah perkebunan, industri, dan perdagangan dimana ketiga sektor tersebut masuk dalam sektor lapangan usaha sekunder.

4.3 Pembagian Wilayah Berdasarkan Administrasi Pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1956, Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1956, Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1956, peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.4 Tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 17 daerah Tingkat II yaitu 11 kabupaten dan 6 kota. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang No. 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba Samosir, Undang-undang No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padang Sidempuan, Undang-undang No.9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat, serta Undang-undang No. 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samsir dan Serdang Bedagai maka wilayah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi 18 Kabupaten dan 7 kota. Secara keseluruhan, terdapat 361 kecamatan dan 5.626 desa yang tersebar pada setiap kabupaten dan kota. Perbandingan luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk antar kabupaten/kota adalah seperti terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa baik luas kabupaten maupun jumlah penduduk sangat bervariasi. Luas kabupaten bervariasi dari 1.218,30 km² (Pakpak Bharat) sampai 12.318,30 km² (Tapanuli Selatan) dan jumlah penduduk berkisar dari 34.260 jiwa (Pakpak Bharat) sampai 1.523.881 jiwa (Deli Serdang). Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, kabupaten yang paling padat ialah Deli Serdang (663 jiwa /km²) dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya ialah Pakpak Bharat. Sementara tahun 2005 penduduk Sumatera Utara mencapai 12.326.678 jiwa dengan kepadatan 172 jiwa/km².

Tabel 4.2. Perbandingan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2004 dan 2005

Kabupaten /Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	
		2004	2005	2004	2005
1. Nias	3.495,39	433.350	441.807	124	126
2.Mandailing Natal	6.618,79	379.045	386.150	57	58

3. Tapanuli Selatan	12.138,30	609.922	626.702	50	52
4. Tapanuli Tengah	2.188,00	278.472	283.035	127	129
5. Tapanuli Utara	3.726,52	255.400	256.201	69	69
6. Toba Samosir	2.474,40	167.587	158.677	68	64
7. Labuhan Batu	9.223,18	933.866	951.773	101	103
8. Asahan	4.580,75	1.009.856	1.024.369	220	224
9. Simalungun	4.386,60	818.975	826.101	187	188
10. Dairi	1.927,80	259.158	261.287	134	136
11. Karo	2.127,29	312.300	316.207	147	149
12. Deli Serdang	2.407,96	1.523.881	1.569.638	633	652
13. Langkat	6.263,30	955.348	970.433	153	155
14. Nias Selatan	1.825,20	282.715	288.233	155	158
15. H. Hasundutan	2.517,66	155.222	156.169	65	66
16. Pakpak Bharat	1.218,30	34.260	34.542	28	28
17. Samosir	2.069,05	119.873	131.073	58	63
18. Serdang Bedagai	1.989,98	583.071	588.176	293	296
19. Sibolga	10,77	87.260	88.717	8102	8237
20. Tanjung Balai	60,52	149.238	152.814	2466	2.525
21. Pematang siantar	79,99	227.551	230.487	2845	2.881
22. Tebing Tinggi	37,99	134.382	135.671	3537	3.571
23. Medan	265,10	2.010.676	2.036.185	7585	7.681
24. Binjai	90,33	232.236	237.904	2571	2.634
25. P. Sidempuan	140,00	172.419	177.499	1232	1.268
Sumatera Utara	71.680,68	12.123.360	12.326.678	169	172

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 maka pengaturan rumah tangga daerah telah berada pada kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Namun demikian, Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan perannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tetap memiliki kewenangan atas daerah otonom kabupaten/ kota dalam hal pengkoordinasian pembangunan dan pengawasannya untuk menjamin agar pembangunan pada setiap daerah otonom pada masing-masing provinsi selalu berada dalam koridor pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tanggal 31 Juli 2001 untuk

membentuk dinas-dinas sebagai institusi teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Undang-undang No.22/1999 .tugas pokok dan fungsi dinas-dinas semakin terbatas karena sebagian besar telah didesentralisasi ke daerah bawahan kabupaten dan kota.

Dalam bidang politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara hasil pemilihan umum tahun 2003 yaitu Partai Golkar sebanyak 19 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 13 orang, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 8 orang, Partai Demokrat sebanyak 10 orang, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 8 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 8 orang, Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 5 orang, Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 5 orang, Partai Bulan Bintang sebanyak 3 orang dan Partai lainnya sebanyak 5 orang.

4.4 Demografis

Propinsi Sumatera Utara merupakan Propinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara keadaan tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,26 juta jiwa, dan dari hasil SP2000, jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 11,51 juta jiwa. Pada bulan April tahun 2003 dilakukan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Dari hasil pendaftaran tersebut diperoleh jumlah penduduk sebesar 11.890.399 jiwa. Selanjutnya dari hasil estimasi jumlah penduduk keadaan Juni 2007 diperkirakan sebesar 12.834.371 jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan tahun 2007 meningkat menjadi 179 jiwa per km². Penduduk Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku, yaitu Melayu, Batak, Nias, Aceh, Minangkabau, Jawa dan telah beragama. Walaupun berbeda Agama dan adat istiadat, kehidupan bersama berlangsung rukun dan damai dengan Pancasila sebagai pedoman hidup.

4.4.1 Jumlah Penduduk

Pada tahun 2003, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara berjumlah 11.890.399 jiwa, terdiri dari 5.942.682 laki-laki dan 5.947.717 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 166 Jiwa/Km². Sekitar 56,75 % penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 43,25 % bertempat tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2007, penduduk Provinsi Sumatera Utara bertambah jumlahnya menjadi 12.834.371 jiwa yang terdiri dari 6.405.076 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 49,91 persen dan 6.429.925 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 50,09 persen, dengan kepadatan rata-rata 179 Jiwa/Km².

4.4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan Penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 1990 – 2000 adalah 1,20 persen pertahun, dan pada Tahun 2000 – 2005 menjadi 1,35 persen pertahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi antara Tahun 2000 – 2005 terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,96 persen pertahun, hal ini kemungkinan karena letak Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai daerah transit bagi Kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Nias dan Tapanuli Selatan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah ada di Kabupaten Toba Samosir, yang tercatat sebesar negatif 0,96 persen pertahun. Berdasarkan struktur usia keseluruhan terdiri dari 33,68 persen berusia dibawah 15 Tahun; 42,06 persen wanita usia subur dan 18,17 persen usia diatas 45 Tahun (termasuk 3,3 persen diatas 64 Tahun).

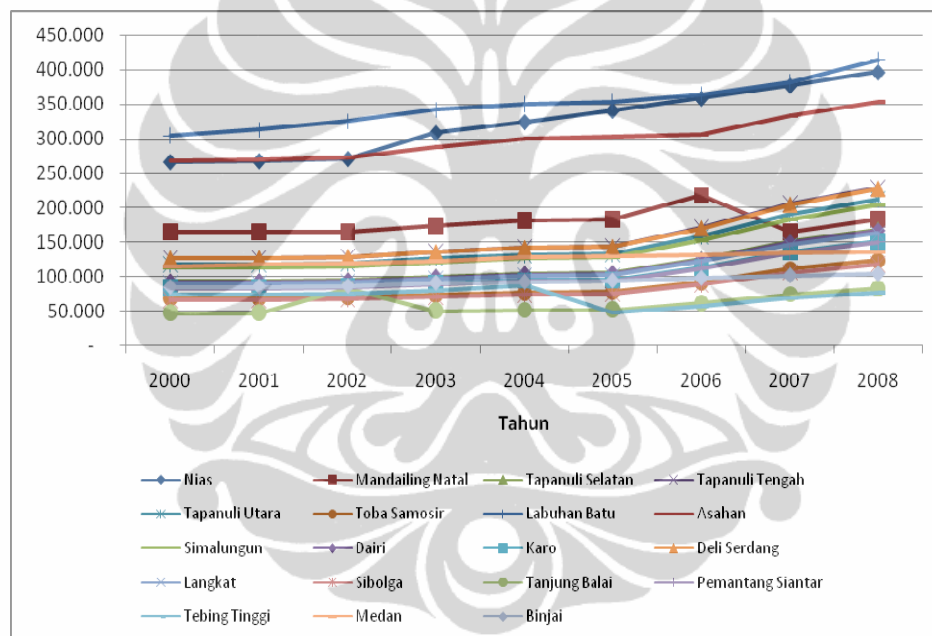
4.4.3 Struktur Usia

Berdasarkan struktur usia, secara keseluruhan penduduk Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33,68 persen berusia dibawah 15 Tahun; 42,06 persen wanita usia subur dan 18,17 persen usia diatas 45 Tahun (termasuk 3,3 persen diatas 64 Tahun).

4.5 Penduduk yang bekerja.

Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Utara selama tahun 2000-2008 selalu meningkat setiap tahunnya. Gambaran jumlah penduduk bekerja

dapat dilihat pada grafik 4.1. Skor terendah atau minimum yang diperoleh untuk variabel Penduduk yang Bekerja adalah 46.844 orang. Kondisi ini memberi makna, bahwa pada kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara periode 2000-2008, Penduduk yang Bekerja terendah diperoleh Kabupaten Tanjung Balai pada tahun 2002. Skor tertinggi (maksimum) = 635.613 orang artinya bahwa pada kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara periode 2000-2008, Penduduk yang Bekerja tertinggi diperoleh Kabupaten Nias pada tahun 2008. Adapun nilai *mean* atau rata-rata Penduduk yang Bekerja pada kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara periode 2000-2008 sebesar 155.320 orang dan nilai standar deviasinya sebesar 107.361 orang.



Sumber : Data Diolah

Grafik 4.1.

Penduduk Bekerja Sumatera Utara Tahun 2000-2008

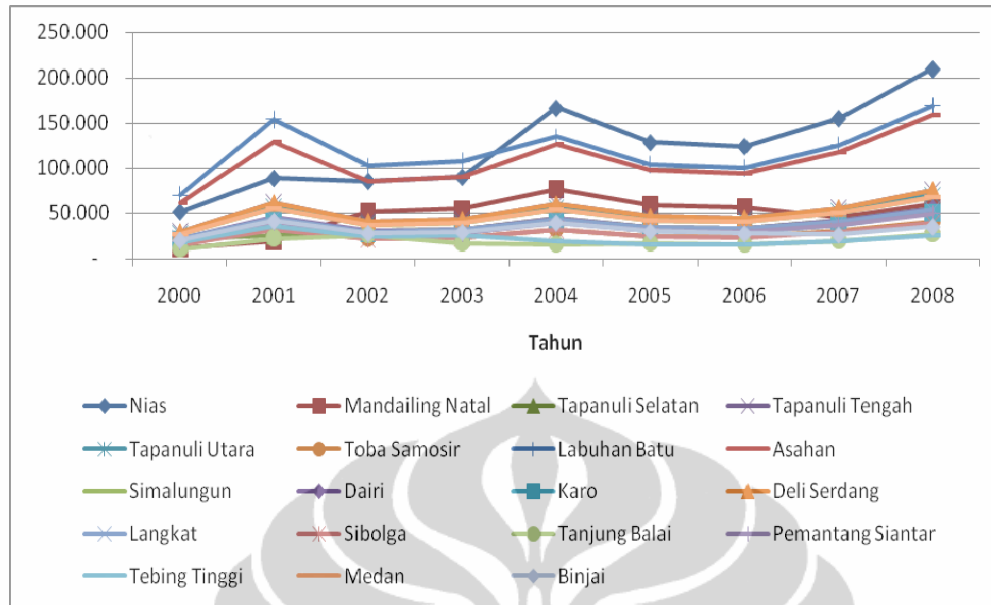
Dari grafik 4.1 dapat dilihat bahwa untuk Kabupaten Nias, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Asahan memiliki perbedaan dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumatera Utara. Ketiga kabupaten tersebut memiliki jumlah penduduk bekerja yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena pada ketiga daerah tersebut, potensi unggulannya adalah sektor lapangan usaha dibidang pertanian dan perkebunan. Pada kedua sektor lapangan usaha

tersebut, penduduk yang ingin bekerja di sektor tersebut tidak memerlukan tingkat sumber daya manusia yang tinggi seperti memiliki keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi.

4.6 Penduduk yang Bekerja Dengan Lulusan SMA

Faktor pendidikan pekerja menurut berbagai penelitian ahli, besar pengaruhnya terhadap produktivitas pekerja disamping faktor-faktor lainnya seperti pengalaman, lingkungan kerja yang kondusif dan sebagainya. Semakin baik tingkat pendidikan pekerja, maka tingkat produktivitas pekerja tersebut semakin tinggi dan berlaku kondisi sebaliknya. Pendidikan tenaga kerja disini sebenarnya tidak saja pendidikan formal (pendidikan yang dilegalisasi oleh pemerintah), melainkan juga pendidikan non-formal seperti keterampilan, training, magang dan sebagainya. Namun karena sulitnya memperoleh informasi akurat tentang pendidikan non formal, maka dalam tesis ini pembahasan pendidikan tenaga kerja di fokuskan pada pendidikan formal yang berijazah SMA.

Distribusi frekuensi dari data variabel Penduduk yang Bekerja Dengan Lulusan SMA yang diperoleh terlihat pada gambar 4.2. skor terendah atau minimum yang diperoleh untuk variabel Penduduk yang Bekerja Dengan Lulusan SMA adalah 10.774 orang. Kondisi ini memberi makna, bahwa pada kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara periode 2000-2008, Penduduk yang Bekerja Dengan Lulusan SMA terendah diperoleh Kabupaten Tanjung Balai pada tahun 2000. Skor tertinggi (maksimum) sebesar 209.562 orang artinya bahwa pada kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara periode 2000-2008, Penduduk yang Bekerja Dengan Lulusan SMA tertinggi diperoleh Kabupaten Nias pada tahun 2008. Adapun nilai *mean* atau rata-rata Penduduk yang Bekerja Dengan Lulusan SMA pada kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara periode 2000-2008 sebesar 49.946 orang dan nilai standar deviasinya sebesar 35.306.



Sumber : Data Diolah

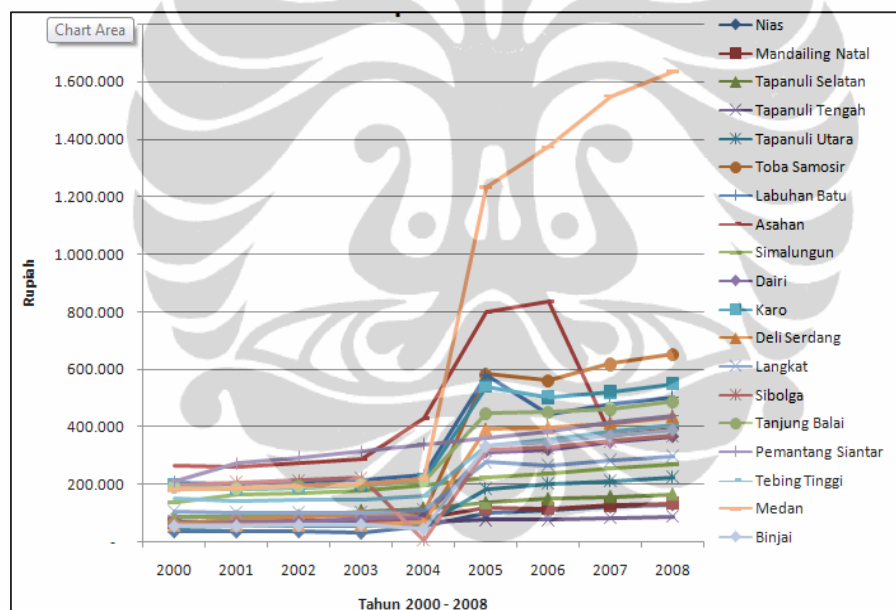
Grafik 4.2

Penduduk Bekerja Tamat SMA Sumatera Utara Tahun 2000-2008

Dari grafik 4.2 dapat dilihat bahwa untuk Kabupaten Nias, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Asahan memiliki perbedaan dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumatera Utara. Ketiga kabupaten tersebut memiliki jumlah penduduk bekerja tamatan SMA yang tinggi. Seperti halnya pada pembahasan tentang penduduk bekerja, maka hal yang sama terjadi pada tingginya jumlah penduduk bekerja tamatan SMA pada ketiga kabupaten tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pada ketiga daerah tersebut, potensi unggulannya adalah sektor lapangan usaha dibidang pertanian dan perkebunan. Pada kedua sektor lapangan usaha tersebut, penduduk yang ingin bekerja di sektor tersebut tidak memerlukan tingkat sumber daya manusia yang tinggi seperti memiliki keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi sehingga penduduk yang sudah lulus SMA akan berpikir untuk langsung bekerja di sektor yang mayoritas pada daerahnya. Di samping itu, terbatasnya ketersediaan sarana pendidikan yang lebih tinggi menjadi penyebab mayoritas penduduk hanya berhenti pada tingkat SMA.

4.7 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)

Distribusi frekuensi dari data variabel PMTDB yang diperoleh terlihat pada gambar 3.3.:Skor terendah atau minimum yang diperoleh untuk variabel PMTDB adalah Rp. 6.272,13 Miliar. Kondisi ini memberi makna, bahwa pada kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara periode 2000-2008, PMTDB terendah diperoleh Kabupaten Sibolga pada tahun 2004. Skor tertinggi (maksimum) sebesar Rp. 1.635.665 Miliar artinya bahwa pada kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara periode 2000-2008, PMTDB tertinggi diperoleh Kota Medan pada tahun 2008. Adapun nilai *mean* atau rata-rata PMTDB pada kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara periode 2000-2008 sebesar Rp. 252.578 Miliar dan nilai standar deviasinya sebesar Rp. 246.594 Miliar.



Sumber : Data Diolah

Grafik 4.3.
PMTDB Sumatera Utara Tahun 2000-2008

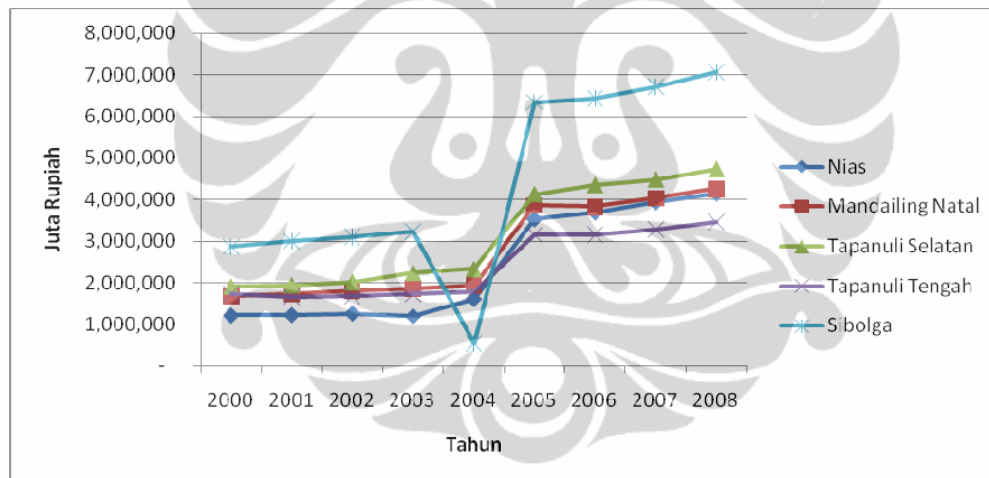
Berdasarkan data grafik 4.3, dapat dilihat bahwa Kota Medan memiliki grafik yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumatera Utara. Daerah tersebut dapat digolongkan pada daerah yang cukup maju dalam bidang perekonomian. Kota Medan merupakan daerah pusat Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Utara sehingga daerah tersebut dapat dikatakan

paling maju dibandingkan daerah lainnya. Tingkat kemajuan perekonomian tersebut merupakan hasil dari tingginya angka Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yang didukung oleh potensi wilayahnya yaitu sektor lapangan usaha dibidang perdagangan, jasa, dan perbankan.

4.8. Trend PDRB di Propinsi Sumatera Utara

4.8.1 Trend PDRB di Wilayah Pantai Barat

Wilayah Pantai Barat adalah wilayah yang memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Wilayah Pantai Barat yang mencakup daerah Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Pada grafik 4.4 dapat dilihat peningkatan PDRB di wilayah Pantai Barat.



Sumber : Data diolah

Grafik 4.4. PDRB di wilayah Pantai Barat

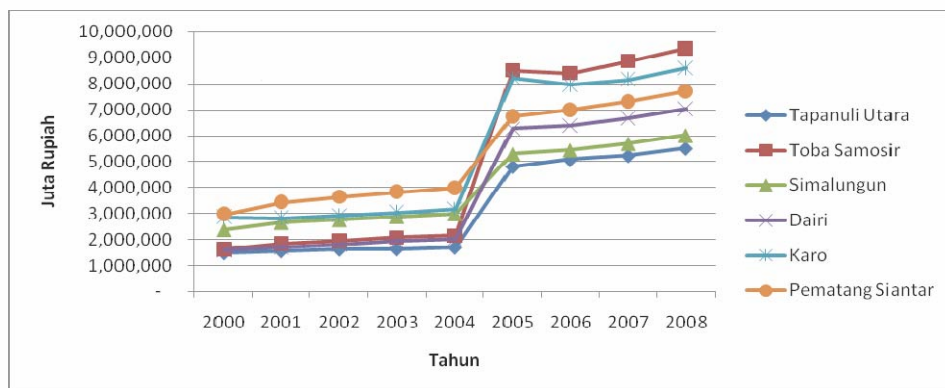
Dari grafik, dapat kita lihat fluktuasi pertumbuhan PDRB di kabupaten/kota yang tercakup dalam Wilayah Pantai Barat. PDRB tertinggi dimiliki oleh Kota Sibolga. Pada tahun 2000, Kota Sibolga memiliki PDRB sebesar 2,86 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2000 hingga 2003, terjadi peningkatan nilai PDRB sebesar 368 miliar rupiah sehingga PDRB Kota Sibolga pada tahun 2003 dapat mencapai 3,23 triliun rupiah. Namun pada tahun 2004 terjadi penurunan nilai PDRB yang cukup tajam yaitu sebesar

2,69 triliun rupiah, sehingga PDRB Kota Sibolga pada tahun 2004 adalah 540 miliar rupiah. Tahun 2004 hingga 2008, nilai PDRB Kota Sibolga mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 6,52 triliun rupiah, sehingga nilai PDRB pada tahun 2008 adalah sebesar 7,06 triliun rupiah.

Sedangkan, daerah yang memiliki PDRB terendah di Wilayah Pantai Barat adalah Kabupaten Nias. Pada tahun 2000, PDRB Kabupaten Nias adalah sebesar 1,21 triliun rupiah. Hingga tahun 2004, PDRB Kabupaten Nias mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 394 miliar rupiah sehingga PDRB pada tahun 2004 adalah sebesar 1,61 triliun rupiah. Sejak tahun 2005, PDRB Kabupaten Nias tidak lagi merupakan PDRB terendah di Wilayah Pantai Barat. Sejak tahun 2005, PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki PDRB terendah dibandingkan daerah lainnya di wilayah Pantai Barat. Pada tahun 2005, PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar 3,15 triliun rupiah dan pada tahun 2008 menjadi sebesar 3,46 triliun rupiah.

4.8.2 Trend PDRB di Wilayah Dataran Tinggi

Wilayah Dataran Tinggi adalah wilayah yang memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Wilayah Dataran Tinggi yang mencakup daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kota Pematang Siantar. Pada grafik 4.5 dapat dilihat peningkatan PDRB di wilayah Dataran Tinggi.



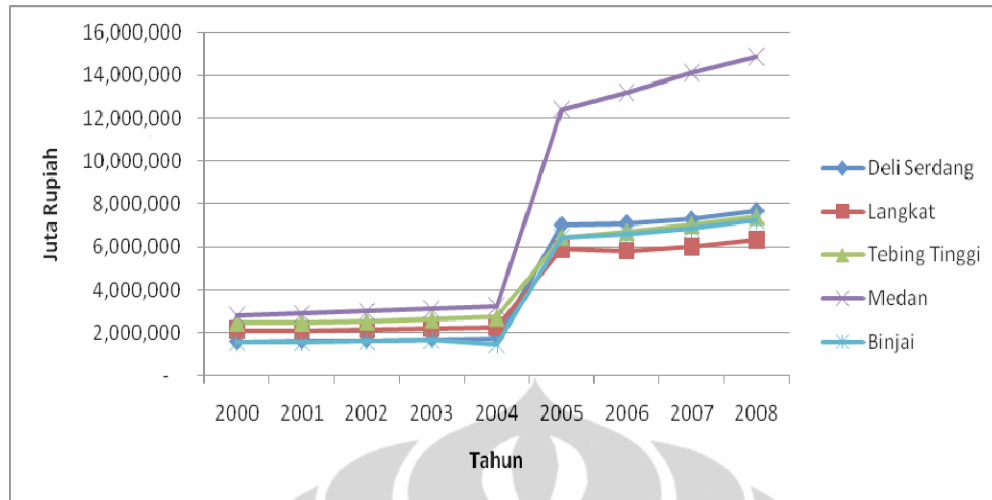
Sumber : Data diolah

Grafik 4.5. PDRB di wilayah Dataran Tinggi

Dari grafik, dapat kita lihat fluktuasi pertumbuhan PDRB yang sangat bervariasi di kabupaten/kota yang tercakup dalam Wilayah Dataran Tinggi. PDRB tertinggi dimiliki oleh Kota Pemantang Siantar. Pada tahun 2000, Kota Pemantang Siantar memiliki PDRB sebesar 2,96 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2000 hingga 2004, terjadi peningkatan nilai PDRB sebesar 1,02 triliun rupiah sehingga PDRB Kota Pemantang Siantar pada tahun 2004 dapat mencapai 3,98 triliun rupiah. Pada tahun 2004 hingga tahun 2008, terjadi peningkatan nilai PDRB yaitu sebesar 3,77 triliun rupiah, sehingga PDRB Kota Pemantang Siantar pada tahun 2008 adalah 7,71 triliun rupiah. Namun, peningkatan PDRB Kota Pemantang Siantar sejak tahun 2005 hingga 2008 bukan merupakan peningkatan nilai PDRB tertinggi di wilayah Dataran Tinggi. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2008, Kabupaten Toba Samosir memiliki nilai PDRB yang tertinggi yaitu pada tahun 2005 adalah sebesar 8,53 triliun rupiah dan pada tahun 2008 adalah sebesar 9,38 triliun rupiah. Sedangkan, daerah yang memiliki PDRB terendah di Wilayah Dataran Tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2000, PDRB Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar 1,48 triliun rupiah. Hingga tahun 2008, PDRB Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,03 triliun rupiah sehingga PDRB Tapanuli Utara pada tahun 2008 adalah sebesar 5,51 triliun rupiah.

4.8.3 Trend PDRB di Wilayah Pantai Timur

Wilayah Pantai Timur adalah wilayah yang memiliki potensi unggulan di bidang perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Wilayah Pantai Timur yang mencakup Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai. Pada grafik 4.6 dapat dilihat peningkatan PDRB di wilayah Pantai Timur.



Sumber : Data diolah

Grafik 4.6. PDRB di wilayah Pantai Timur

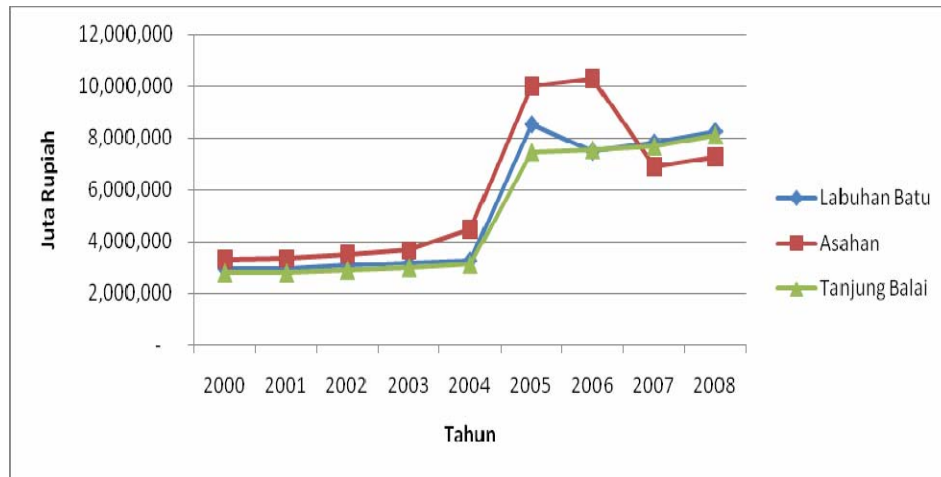
Dari grafik, dapat kita lihat fluktuasi pertumbuhan PDRB yang sangat bervariasi di kabupaten/kota yang tercakup dalam Wilayah Pantai Timur. PDRB tertinggi dimiliki oleh Kota Medan. Pada tahun 2000, Kota Medan memiliki PDRB sebesar 2,77 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2000 hingga 2008, terjadi peningkatan nilai PDRB sebesar 12,1 triliun rupiah sehingga PDRB Kota Medan pada tahun 2008 dapat mencapai 14 triliun rupiah.

Sedangkan, daerah yang memiliki PDRB terendah di Wilayah Pantai Timur adalah Kabupaten Binjai. Pada tahun 2000, Kabupaten Binjai memiliki PDRB sebesar 1,53 triliun rupiah. Pada tahun 2004, PDRB Kabupaten Binjai mengalami penurunan sebesar 80,81 miliar rupiah dimana PDRB pada tahun 2004 adalah 1,45 triliun rupiah. Sejak tahun 2005, PDRB terendah di Wilayah Pantai Timur adalah kabupaten Langkat yaitu sebesar 5,9 triliun rupiah. Hingga tahun 2008, nilai PDRB Kabupaten Langkat masih pada posisi terendah dibandingkan daerah yang lain yaitu sebesar 6,34 triliun rupiah.

4.8.4 Trend PDRB di Wilayah Pantai Selatan

Wilayah Pantai Selatan adalah wilayah yang memiliki potensi unggulan di bidang perkebunan, industri, dan perdagangan. Wilayah Pantai Selatan yang mencakup Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, dan Kota

Tanjung Balai. Pada grafik 4.7 dapat dilihat peningkatan PDRB di wilayah Pantai Selatan.



Sumber : Data diolah

Grafik 4.7. PDRB di wilayah Pantai Selatan

Dari grafik, dapat kita lihat fluktuasi pertumbuhan PDRB yang sangat bervariasi di kabupaten/kota yang tercakup dalam Wilayah Pantai Selatan. PDRB tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Asahan. Pada tahun 2000, Kabupaten Asahan memiliki PDRB sebesar 3,32 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2000 hingga 2006, terjadi peningkatan nilai PDRB sebesar 6,97 triliun rupiah sehingga PDRB Kabupaten Asahan pada tahun 2006 dapat mencapai 10,29 triliun rupiah. Pada tahun 2007, terjadi penurunan pada PDRB Kabupaten Asahan sebesar 3,21 triliun rupiah, sehingga PDRB Kabupaten Asahan pada tahun 2008 menjadi 7,28 triliun rupiah. Jika dilihat kembali pada grafik, PDRB tertinggi pada tahun 2007 hingga 2008 adalah Kabupaten Labuhan Batu yaitu masing-masing sebesar 7,82 triliun rupiah dan 8,2 triliun rupiah.

Sedangkan, daerah yang memiliki PDRB terendah di Wilayah Pantai Selatan adalah Kota Tanjung Balai. Pada tahun 2000 hingga 2006, Kota Tanjung Balai memiliki PDRB terendah dan pada tahun 2007 dan 2008, PDRB kabupaten Labuan Batu adalah yang terendah.